

ABSTRAK

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya bertujuan untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila. Guna mencapai tujuan tersebut maka pembangunan harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat secara seimbang, yaitu pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Partisipasi di sini berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai usaha seperti misalnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pembangunan masyarakat desa dengan sebaik-baiknya di samping pemerintah desa terdapat pula LKMD di masing-masing desa yang berperan dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Skripsi ini dengan judul Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, pada intinya permasalahan yang penulis teliti yaitu proyek/peristiwa pembangunan yang ada di desa, partisipasi masyarakat dalam pelbagai jenis proyek pembangunan dan peranan LKMD dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas penulis menggunakan inventarisasi dan kategorisasi berdasarkan karakteristik jenis proyek dan analisis deskriptif dengan pendekatan tabel.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa jenis proyek yang paling besar menyerap partisipasi masyarakat adalah proyek swadaya masyarakat murni. Hal ini disebabkan proyek swadaya masyarakat murni adalah proyek yang tumbuh dari bawah atau proyek yang berasal dari masyarakat sendiri. Jadi semakin proyek itu berorientasi ke masyarakat semakin besar partisipasi masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMD Desa Sendangmulyo belum mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat, dan dalam proyek pembangunan yang dikelolanya itu LKMD lebih memihak kepada masyarakat golongan Elit Lokal dari pada golongan Rakyat banyak, sehingga tujuan LKMD seperti yang dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 belum dapat terwujud secara baik.